

POLA REKRUITMEN ANGGOTA LAGISLATIF PPP DI DPRD TK. II KOTAMADYA SURABAYA PADA PEMILU 1997

(SUATU KAJIAN DESKRIPTIF TERHADAP KONFLIK DALAM REKRUITMEN LAGISLATIF
DI DPC PPP KOTAMADYA SURABAYA PADA PEMILU 1997)

SKRIPSI

KK

FIS. P 179/98.

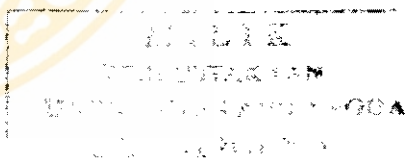
HQ
P



OLEH :

SITI NAFSIAH

NIM : 079213498



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
Semester Genap Tahun 1998/1999

Setuju untuk diujikan,

Surabaya, 3 Juli 1998



Dosen Pembimbing,



Drs. Hariyadi, M.Si
NIP. 131653466

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada hari Kamis,
23 Juli 1998.**

Panitia Penguji terdiri dari :


1. Drs. Hariyadi, M.Si.
NIP. 131653466


2. Drs. Priyatmoko, M.A.
NIP. 130937952


3. Drs. Wisnu Pramutanto
NIP. 131453124



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Fenomena Pemilu di Indonesia merupakan fenomena lima tahunan yang bertujuan untuk mengisi kursi di lembaga legislatif baik di DPR-RI maupun DPRD Tk. I/II. Dan pelaksanaannya diatur berdasarkan UU Pemilu no. 1 tahun 1985. Terkait dengan hal tersebut adalah bagaimana proses rekrutmen anggota legislatif di intern partai khususnya PPP Surabaya yang menjadi obyek kajian dalam tulisan ini.

Secara teknis operasional, mekanisme dan prosedur rekrutmen anggota legislatif diatur dalam Peraturan Mendagri, yang terdiri dari beberapa tahap. Sementara itu, mekanisme penyusunan daftar calon legislatif masing-masing partai diserahkan sepenuhnya kepada partai yang bersangkutan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas maka DPC PPP Kotamadya Surabaya membentuk Lajnah Penetapan Calon anggota DPRD Tk. II Kotamadya Surabaya, berdasarkan SK. DPP PPP No.237/KPTS/DPP/V/1996 dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang dikeluarkan oleh DPP PPP di Jakarta.

Dalam rekrutmen anggota legislatif ini, DPC PPP Kotamadya Surabaya menggunakan prosedur tertutup, seperti yang dikemukakan oleh Almond dan Powell. Dimana seleksi terhadap nama-nama calon legislatif dilakukan secara tertutup oleh

Lantap. Yang mana seleksi tersebut didasarkan pada syarat-syarat: pengabdian calon, loyalitas, kualitas dan integritas pribadi calon. Dan menurut data yang diperoleh, ternyata seleksi inipun juga tidak lepas dari pola-pola hubungan patron-klien, yang terdapat dalam PPP Surabaya.

Mengingat terbatasnya kursi di DPRD Tk. II Surabaya terutama kursi yang diperoleh PPP Surabaya (pada Pemilu 1992) maka dalam rekrutmen caleg ini akhirnya diwarnai konflik dalam bentuk perebutan nomer urut. Namun konflik yang muncul tidak berbentuk kekerasan tapi hanya beda pendapat (walaupun secara tajam) antar kelompok atau unsur pendukung PPP Surabaya yaitu: NU dan MI — dan bukan antar individu PPP —. Hal ini disebabkan karena masih belum tuntasnya fusi PPP, khususnya di lingkungan DPC PPP Kotamadya Surabaya. Sehingga masing-masing unsur masih berorientasi pada kepentingan unturnya masing-masing dalam setiap pengambilan keputusan politik partai khususnya dalam hal rekrutmen caleg.

Adapun mekanisme penyelesaian konflik yang di lakukan DPC PPP Kotamadya Surabaya adalah diselesaikan secara mufakat oleh intern struktur partai. Bila gagal, maka diserahkan kepada ketua dan sekretaris partai. Dan bila gagal lagi maka diadakan voting tertutup. Dan bila tetap gagal maka diserahkan kepada DPP sebagai struktur PPP yang paling atas.

Dalam kenyataannya, penyelesaian konflik PPP Surabaya baru dapat diselesaikan setelah diambil alih oleh DPP. Walaupun menurut Ketua DPC PPP Surabaya dianggap tidak legal dan mengebiri wewenang Ketua DPC dengan cara